

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berlangsungnya proses pembentukan opini publik HMI MPO cabang Yogyakarta terkait isi pesan stiker Soeharto versi “ *Piye Kabare Le? Iseh Penak Jaman Aku to?*” dilakukan melalui forum diskusi secara bertahap. Forum diskusi itu berlangsung tanpa ada perencanaan tersistematis oleh pengurus HMI MPO cabang Yogyakarta. Tetapi diskusi itu tetap berlangsung secara bertahap sampai menemukan keputusan bersama. Berikut tahapan proses pembentukan opini public HMI MPO cabang Yogyakarta :

1. Tahap pertama, pembahasan masih jauh dari harapan. Dikarenakan kader yang ikut dalam pembahasan itu mengemukakan pendapat mereka masing-masing berdasarkan sumber referensi yang berbeda-beda, sehingga kesepakatan bersamapun sulit untuk disepakati.
2. Tahap kedua, pembahasan sudah mengarah pada satu pemahaman. Hal ini ditandai dengan pendapat salah satu kader yang menyatakan bahwa di era kepemimpinan Soeharto pernah melakukan penggusuran pemukiman warga di Jawa Tengah. Dalam hal ini menurutnya, Soeharto melanggar hak sipil masyarakat. Dari pemaparan pendapat inilah kader lainnya yang ikut dalam pembahasan kedua tersebut menyepakatinya.

3. Pada tahap akhir diskusi itu menghasilkan sebuah kesimpulan berupa opini publik HMI MPO cabang Yogyakarta yang menyatakan bahwa segala bentuk tindakan Soeharto yang dilakukannya merupakan tindakan yang sangat buruk, mengabaikan hak sipil masyarakat atas dasar pembangunan.

Terbentuknya opini publik HMI MPO cabang Yogyakarta tersebut, faktanya bertolak belakang dengan persepsinya masyarakat. Masyarakat menilai Soeharto sangat ideal memimpin Negara ini di era kepemimpinannya. Mereka berpandangan seperti itu dikarenakan masyarakat hanya menilai Soeharto dari sudut pandang kesejahteraan saja. Sementara HMI MPO cabang Yogyakarta berpandangan lebih jauh tentang Soeharto. Dimana mereka menilai Soeharto dari sudut pandang kemanusiaan. Karena di eranya Soeharto kebebasan berkespresi tidak diberikan hak sepenuhnya kepada rakyat.

Kemudian dengan adanya forum diskusi pembentukan opini publik tersebut, intensitas pertemuan kader semakin terjalin. Hal ini juga didukung oleh kondisi mendekati masa pemilihan presiden ditahun 2015. Karena bagi mereka sosok salah satu calon presiden priode 2015-2020 memiliki kesamaan gaya kepemimpinan dengan Soeharto yang berkarakter otoriter.

Tetapi untuk fungsi dan manfaat opini publik HMI MPO cabang Yogyakarta dirasa kurang maksimal. Karena setelah terbentuknya opini publik

tersebut, mereka tidak melakukan tindakan lanjutan untuk mensosialisasikan kepada khalayak luas. Padahal hal ini sangatlah penting. Masyarakat tentunya sangat minim referensi sehingga membuat mereka sangat mudah untuk digiring opininya dan kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang sepenuhnya tidak mementingkan kepentingan mereka.

B. Saran

Dari hasil penelitian diatas, maka peneliti memaparkan saran-saran yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan HMI MPO cabang Yogyakarta tentang proses pemebentukan opini publik, yaitu :

1. Melakukan perencanaan diskusi yang tersistematis di internal HMI MPO cabang Yogyakarta terkait dengan isi pesan stiker Soeharto "*Piye Kabare Le? Iseh Penak Jaman Aku to?*", karena stiker tersebut kental dengan muatan politis, sehingga dibutuhkan keseriusan untuk mendiskusikannya.
2. Mengingat seringnya pemerintah Indonesia saat ini mengabaikan aspirasi rakyat, maka sebaiknya HMI khususnya HMI MPO cabang Yogyakarta lebih berperan aktif memberi kritik dan solusi kongkret kepada pemerintah atas dasar pembelaan kepentingan rakyat.
3. Melakukan evaluasi kembali mengenai sosialisasi opini publik HMI MPO cabang Yogyakarta terkait isi pesan stiker Soeharto versi "*Piye Kabare Le? Iseh Penak Jaman Aku to?*" yang tertuju kepada masyarakat.

4. Kader-kader senior HMI MPO cabang Yogyakarta sebaiknya memaksimalkan peranannya sebagai pemimpin opini ketika berdiskusi dengan kader-kader muda, agar tidak terjadi kesalah pemahaman terkait dengan isi pesan stiker Soeharto versi “ *Piye Kabare Le? Iseh Penak Jaman Aku to?* ”.
5. Melakukan publikasian opini melalui media massa sehingga masyarakat dapat mengetahui dan memahami fenomena yang sedang mengalami kontroversi pendapat.